

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan mata pencaharian, penyediaan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, serta penyumbang devisa negara sehingga mempengaruhi pembangunan suatu wilayah (Dewi *et al.*, 2022). Badan Pusat Statistik (2025), melaporkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan ketiga mencapai Rp 869,4 triliun atas harga berlaku atau sebanyak 14,35 %. Secara riil, sektor pertanian tumbuh 3,32% (*q-to-q*) dan 4,93% (*y-on-y*) dengan pertumbuhan kumulatif 5,37% (*c-to-c*) dibandingkan tahun lalu (BPS, 2025). Sektor pertanian yang ditopang oleh subsektor perkebunan, perikanan, pangan, kehutanan dan peternakan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan (BPS, 2025).

Sektor pertanian berkaitan erat dengan sektor industri karena kemajuan dalam bidang pertanian akan mendorong perkembangan sektor industri. Kerangka pembangunan ekonomi harus dirancang dengan mengintegrasikan kedua sektor tersebut, artinya industri dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh sektor pertanian yang kokoh (Soekartawi, 2010). Terutama pada pembangunan industri pengolahan hasil pertanian

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian nasional yang berperan penting sebagai sumber pangan, bahan baku industri serta penopang pendapatan masyarakat di wilayah sentra produksi (Cahyaningsih *et al.*, 2025). Komoditas ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor hilir seperti industri makanan, industri tepung tapioka, pakan ternak hingga bioenergi.

Fluktuasi produksi ubi kayu akan memengaruhi kinerja pelaku-pelaku ekonomi sektor hulu hingga hilir pertanian (Marleni *et al.*, 2023). Berikut ini data tingkat produksi ubi kayu di Indonesia tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1.1 Produksi Ubi Kayu di Indonesia 2019 – 2023 (ton)

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung	5.438.850	5.820.831	5.643.185	5.94.823	7.227.672
Jawa Tengah	2.884.726	3.257.955	2.863.289	2.478.470	2.662.480
Jawa Timur	1.888.803	1.552.634	1.618.905	1.432.116	1.452.965
Jawa Barat	1.579.185	1.309.557	1.299.196	1.033.087	1.188.760
Sumatera Utara	1.226.979	1.092.745	1.065.047	877.185	1.099.641
NTT	534.468	508.729	516.662	475.923	422.902

Sumber: (Pusdatin, 2024)

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2024), menyebutkan terdapat tujuh provinsi yang menjadi sentra utama penghasil ubi kayu di Indonesia dengan kontribusi produksi yang mencapai 86,93 % dari total produksi nasional. Provinsi-provinsi yang tersebut meliputi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Lampung menempati peringkat pertama sebagai produsen singkong terbesar sementara Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ketiga dengan total produksi 1,4 per ton pada tahun 2023. Produksi ubi kayu Provinsi Jawa Timur relatif stabil jika dibandingkan keempat provinsi lainnya sepanjang 2019 hingga 2023. Achsa *et al.* (2022), melaporkan bahwa Komoditas ubi kayu di Provinsi Jawa Timur tergolong komoditas basis atau komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah tersebut dan mampu memasarkan ubi kayu keluar daerahnya. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah utama yang berkontribusi terhadap pasokan singkong di Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2018), melaporkan jumlah produksi ubi kayu Kabupaten Malang mencapai 37.242 ton dan menempatkan daerah tersebut sebagai sentra penghasil ubi kayu terbesar kedua setelah Kabupaten

Ponorogo. Berikut ini data luas panen, produksi, produktivitas ubi kayu di Kabupaten Malang

Tabel 1.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu Kabupaten Malang 2020-2024

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
2020	4.829,88	124.982,89	6.728,28
2021	6.660,00	172.314,00	6.469,50
2022	5.043,00	176.561,00	5.693,16
2023	4.100,00	104.629,00	6.580,13
2024	3.935,00	101.833,81	5.951,94

Sumber: (DPHP Kabupaten Malang, 2025)

Produksi ubi kayu pada data diatas mengalami penurunan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Malang. Walaupun meningkat hingga 176,5 ribu ton pada 2020 – 2022, produksi kemudian turun tajam menjadi 101,8 ribu ton pada 2024. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah produksi dan produktivitas ubi kayu meliputi kualitas tanah, penggunaan pupuk dan alat pertanian, pengendalian hama dan penyakit, serta pemilihan benih berkualitas (Nurhayati *et al.*, 2025). Selain itu, fluktuasi permintaan-penawaran pasar serta harga jual ubi kayu turut berkontribusi dalam minat petani untuk melanjutkan budidaya singkong. Ketika harga jual singkong naik, petani biasanya meningkatkan hasil panen untuk memaksimalkan keuntungan. Jika harga singkong turun, petani cenderung mengurangi produksi atau bahkan menghentikan sementara budidaya singkong karena biaya produksi yang tinggi tidak dapat ditutupi oleh pendapatan yang diperoleh (Cahyaningsih *et al.*, 2025). Ketika waktu panen raya, banyak petani yang menjual ubi kayu pada waktu yang bersamaan yang menyebabkan terjadinya peningkatan penawaran ubi kayu di pasar sedangkan jumlah permintaan ubi kayu tetap. Kondisi ini memperkuat struktur pasar oligopsoni dimana jumlah petani sebagai penjual lebih banyak dibandingkan pembeli. Hibatullah dan Putri (2025), juga menegaskan bahwa pada struktur pasar

oligopsoni, petani ubi kayu umumnya sebagai *price taker* dalam aktivitas perdagangan karena kurangnya daya saing serta posisi tawar yang rendah terhadap pedagang maupun pabrik pengolahan.

Permasalahan utama petani ubi kayu di Indonesia pada saat ini adalah rendahnya posisi tawar petani dalam aktivitas ekonomi. Posisi tawar adalah kemampuan petani dalam melakukan negoisasi serta menentukan harga jual produk. Dalam struktur rantai nilai pemasaran komoditas pertanian, petani seringkali diposisikan sebagai penerima harga (*price taker*) sedangkan pelaku pemasaran memiliki kemampuan dalam menentukan harga (*price maker*) yang menyebabkan harga jual ditingkat petani rendah dan pendapatan petani turun. Faktor utama yang menyebabkan posisi tawar petani rendah adalah karakteristik produk ubi kayu yang mudah rusak, kualitas hasil panen yang tidak seragam, akses transportasi kurang baik, lemahnya keterkaitan sektor hulu dengan hilir yang mendorong petani menjual produknya ke beberapa pelaku pemasaran yaitu pihak yang menghubungkan petani dengan konsumen akhir. Mata rantai yang panjang mulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang antar daerah hingga ke konsumen akhir menyebabkan harga jual ditingkat petani rendah.

Mutiara *et al.* (2025), melaporkan harga yang diperoleh petani ubi kayu di Kabupaten Malang seharga Rp 950/kg. Sedangkan Kementrian Pertanian (2025), menetapkan harga dasar pembelian ubi kayu seharga Rp 1.350/kg. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa petani ubi kayu di Kabupaten Malang menerima *share* harga yang jauh dari nilai ekonomi yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif yang menyebabkan posisi tawar petani

rendah sehingga membatasi kemampuan petani dalam memperoleh harga yang menguntungkan sebagai dasar penguatan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Posisi tawar petani yang rendah juga seringkali disebabkan oleh minimnya akses petani terhadap layanan dan dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pasar (Mariati *et al.*, 2023). Bentuk layanan dan dukungan kelembagaan tersebut dapat dalam bentuk layanan pengembangan bisnis melalui bantuan permodalan, dukungan akses terhadap teknologi pertanian modern serta kemitraan dengan industri pengolahan. Selain itu, kehadiran kelembagaan juga bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) pada setiap aktivitas ekonomi sehingga aliran produk, informasi dan finansial berjalan dengan lancar dan pola rantai nilai yang terbentuk optimal (Gereffi *et al.*, 2005). Optimalnya rantai nilai dapat dilihat dari distribusi nilai tambah yang diterima oleh masing-masing pelaku yang memperoleh pendapatan yang adil sesuai dengan kontribusinya. Distribusi pendapatan yang adil akan mendorong petani untuk meningkatkan produksinya untuk memaksimalkan keuntungan sehingga rantai nilai yang terbentuk berkelanjutan. Berikut ini perkembangan jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Malang selama periode 2020-2024.

Tabel 1.3 Produksi Ubikayu di Kabupaten Malang tahun 2020-2024

Kecamatan	Produksi (ton)						Growth 2023-2024 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	Rata rata	
Donomulyo	44510	68059	62107	41805	24972	48290	-40.27
Kalipare	12939	34935	62107	14614	7401	26399	-49.36
Jabung	15569	14774	17312	17060	27688	18480	62.30
Poncokusumo	11002	10846	11280	9618	10166	10582	5.70
Ampelgading	8022	6133	7065	6736	5796	6750	-13.95
Sumbermanjing	3726	4451	0	487	414	1815	-14.99
Pagak	1575	2553	2127	1828	0	1616	-100.00
Turen	1987	1417	1806	1365	1389	1597	1.76

Sumber: (DPHP Kabupaten Malang, 2025)

Selama lima tahun terakhir, wilayah Kecamatan Jabung turut berkontribusi sebagai daerah dengan tiga terbesar produksi ubi kayu di Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir (DPHP Kabupaten Malang, 2025). Tabel 1.3. menunjukan bahwa jumlah produksi ubi kayu Kecamatan Jabung mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Malang. Pada tahun 2024, jumlah produksi ubi kayu Kecamatan Jabung mencapai 27.688 ton naik 62,30% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah produksi dan luas panen ubi kayu di Kecamatan Jabung tidak terlepas dari ketersediaan lahan, jumlah petani maupun permintaan dari industri yang terus meningkat. Komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung tidak hanya berperan sebagai penyediaan bahan pangan tetapi juga sebagai komoditas industri pengolahan makanan yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. Namun, potensi besar tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang menunjang keberlangsungan rantai nilai ekonomi yang terbentuk.

Pengembangan ubi kayu di Kecamatan Jabung mengalami beberapa hambatan, salah satunya pada aspek kelembagaan yang menopang rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung. Keberadaan kelompok tani seperti poktan dan gapoktan di tiap desa diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai. Pada kenyataannya banyak kelompok tani yang mati suri, petani hanya aktif secara administratif pada saat tertentu seperti ketika adanya pendistribusian bantuan dari pemerintah. Keberandaan kelompok tani seringkali berakhir ketika program pemerintah juga berakhir. Selain itu, seringkali anggota kelompok tani mengalami keterbatasan informasi dalam mengakses kebijakan program pemerintah atau kesepakatan diambil oleh pengurus kelompok tersebut yang menyebabkan fenomena asimetri informasi antar anggota maupun pengurus kelompok tani. Kurangnya

koordinasi antar petani serta kelompok tani belum mampu menjadi wadah kerja sama mengakibatkan petani menjual hasil panennya secara individual ke tengkulak. Harga jual ubi kayu ditingkat petani sering kali turun saat panen raya akibat kelebihan pasokan serta tidak adanya perlindungan harga bagi petani

Pengembangan komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan yang kokoh agar mampu menjaga rantai nilai ubi kayu secara berkelanjutan. Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya yang menganalisis rantai nilai ubi kayu serta distribusi keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku. Namun, masih sedikit yang membahas bagaimana keterlibatan kelembagaan dalam mengoptimalkan rantai nilai khusus pada komoditas pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dan mekanisme distribusi keuntungan yang diperoleh, mengkaji kinerja dari masing-masing kelembagaan penunjang yang terlibat melalui pelaksanaan fungsi dan layanannya serta menentukan prioritas perbaikan fungsi dan layanan kelembagaan. Apabila tujuan tersebut telah tercapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rancangan strategi penguatan peran kelembagaan baik kelompok tani, kelembagaan keuangan maupun pemerintah sehingga pada akhirnya akan memberikan pemerataan ekonomi masing-masing pelaku dalam rantai nilai khususnya, melalui pembagian keuntungan yang selaras dengan peran mereka dalam rantai nilai.

1.2. Rumusan Masalah

Kecamatan Jabung adalah daerah penyumbang ubi kayu terbesar nomor tiga di Kabupaten Malang dengan tingkat produksi stabil dan relatif meningkat setiap

tahunnya. Hal ini dikarenakan Kecamatan Jabung didukung oleh ketersediaan lahan, jumlah petani serta tingginya permintaan pasar. Namun, potensi tersebut memerlukan peran kelembagaan yang kokoh agar mampu menjaga keberlanjutan rantai nilai yang terbentuk. Peran tersebut diwujudkan oleh seperangkat perilaku aktor yang teramati serta perilaku yang diarahkan untuk memenuhi fungsi dari kelembagaan. Rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung terdiri dari berbagai pelaku yang saling berkoordinasi dalam setiap aktivitas penambahan nilai produk mulai dari bahan baku hingga menjadi produk akhir dan dipasarkan ke konsumen. Selain itu, terdapat kelembagaan penunjang berperan dalam memberikan layanan dan dukungan kepada pelaku untuk memaksimalkan aktivitas rantai nilai melalui seperangkat fungsi-fungsi yang dijalankan. Dalam melaksanakan perannya, pelaku utama maupun kelembagaan penunjang memiliki berbagai hambatan disetiap tahapan aktivitas rantai nilai.

Petani yang berperan sebagai produsen utama ubi kayu di Kecamatan Jabung memiliki posisi tawar yang rendah yang disebabkan karakteristik komoditas ubi kayu yang *perishable* serta lahan produksi yang jauh dari pasar atau industri pengolahan yang menyebabkan petani harus menjual hasil panennya beberapa pelaku pemasaran. Mata rantai yang panjang tersebut menyebabkan distribusi yang diterima oleh petani lebih rendah daripada pelaku pemasaran. Sejalan dengan hasil pra-penelitian, harga jual ubi ditingkat petani Kecamatan Jabung sebesar Rp 1.000/kg. Harga jual tersebut jauh dari nilai ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh petani dimana pemerintah melalui Kementrian Pertanian (2025), menetapkan harga acuan ubi kayu ditingkat petani sebesar Rp 1.350/kg. Rendahnya harga jual tersebut menyebabkan pendapatan petani berkurang serta mengaruhi keputusan petani untuk melanjutkan usahatani.

Keberadaan kelembagaan penunjang kelompok tani dimasing-masing desa masih belum menunjukkan hasil optimal dalam menjalankan perannya untuk membela kepentingan petani. Kelompok tani hanya aktif dalam pendistribusian pupuk subsidi, namun ketika program tersebut selesai, kelembagaan yang terbentuk akan selesai juga. Sedangkan, tujuan dibentuknya kelompok tani pada dasarnya sebagai (1) wadah belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian petani (2) wahana kerja sama yang bertujuan memperkuat kerjasama diantara petani, antar kelompok dan dengan luar kelompok (3) sebagai kesatuan unit bisnis untuk mencapai efisiensi usaha (*economic of scale*) baik dari sisi kualitas dan kuantitas.

Sementara itu, kurangnya pengetahuan petani pada aspek finansial menyebabkan petani lebih memilih mengorbankan modal pribadi seperti menjual properti miliknya untuk menyelamatkan keberlanjutan usahatannya. Di sisi lain, adanya kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan penyuluh pertanian lebih sering dibebankan fungsi-fungsi administratif daripada memenuhi perannya sebagai *advisor* yang mendampingi petani.

Kurang optimalnya peran masing-masing kelembagaan dalam rantai nilai memaksa petani berada dalam aktivitas bernilai tambah yang rendah dan sulit untuk melakukan peningkatan meskipun memiliki peluang. Oleh karena itu, Segala bentuk perbaikan kelembagaan dalam rantai nilai sangat dibutuhkan untuk mennguatkan posisi petani dalam rantai nilai sehinga tercapainya distribusi yang adil masing-masing pelaku dan komoditas ubi kayu yang dihasilkan oleh petani Kecamatan Jabung berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kelembagaan Terhadap Dalam Rantai Nilai Komoditas Ubi Kayu di

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang” maka rumusan masalah yang diambil peneliti antara lain yaitu:

1. Bagaimana rantai nilai (*value chain*) komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran kelembagaan penunjang dalam rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang
2. Menganalisis peran kelembagaan penunjang dalam rantai nilai komoditas ubi kayu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang dipaparkan, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang peran lembaga dalam rantai nilai komoditas pertanian, khususnya singkong. Selain itu, studi ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai dasar pengembangan karir di bidang agribisnis dan pembangunan pertanian.
2. Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi lembaga pertanian, pemerintah daerah, dan

pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

3. Universitas, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi ilmiah dan bahan pembelajaran tambahan bagi komunitas akademis, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang sosial ekonomi pertanian, studi kelembagaan, dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian.
4. Pembaca dan Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi pembaca dan masyarakat umum, khususnya dalam memahami dan menganalisis nilai-nilai yang terkait dengan singkong sebagai komoditas di Indonesia.